ADMINISTRASI PUBLIK

DI ERA GLOBAL

TEORI, PARADIGMA, DAN REFORMASI

Irvan Arif Kurniawan, dkk

ADMINISTRASI PUBLIK DI ERA GLOBAL: TEORI, PARADIGMA, DAN REFORMASI

Irvan Arif Kurniawan, Harry Sampurna, Aprilia Rahmawati, Khaira Alfi Syahrina, Ismi Nur Ain, Saskiyah Alfatunnazlah, Syavilla Atmojo, Muhammad Thoby Ramadhan, Hanifah Maghfiroh, Ayu Hidayah, Salmatul Fariha Citra Aulia

Penerbit
PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara

ADMINISTRASI PUBLIK DI ERA GLOBAL: TEORI, PARADIGMA, DAN REFORMASI

Irvan Arif Kurniawan, Harry Sampurna, Aprilia Rahmawati, Khaira Alfi Syahrina, Ismi Nur Ain, Saskiyah Alfatunnazlah, Syavilla Atmojo, Muhammad Thoby Ramadhan, Hanifah Maghfiroh, Ayu Hidayah, Salmatul Fariha Citra Aulia

ISBN :
Cetakan Pertama, September 2025

Editor:
Dadang Saepuloh

Diterbitkan oleh:
PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara
Jl. Perdamaian No.79, Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15141

Berminat untuk menerbitkan dan mencetak buku hubungi:
Email: bidaracinpress@gmail.com
Whatsapp: +62 815-8558-2370

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "**Administrasi Publik di Era Global: Teori, Paradigma, dan Reformasi"** dapat hadir di tengah para pembaca.

Buku ini disusun sebagai upaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika administrasi publik yang terus berkembang di tengah arus globalisasi. Administrasi publik tidak lagi hanya berbicara tentang birokrasi dan pelayanan, melainkan juga menyangkut inovasi, partisipasi masyarakat, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan teknologi yang sangat cepat.

Di era global, tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif semakin besar. Oleh karena itu, teori dan paradigma klasik perlu dipahami kembali secara kritis, sementara reformasi administrasi publik harus terus diarahkan pada penciptaan pelayanan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui buku ini, pembaca diajak untuk menelusuri evolusi teori administrasi publik, memahami berbagai paradigma yang berkembang, serta melihat bagaimana reformasi dijalankan dalam praktik pemerintahan, khususnya dalam konteks Indonesia. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi ilmiah sekaligus inspirasi praktis bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat kapasitas administrasi publik di era global.

Kami menyadari bahwa buku ini tentu masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami nantikan demi penyempurnaan pada edisi-edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat luas dan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu serta praktik administrasi publik yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

Tangerang, Agustus 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....iv
DAFTAR ISI....v
DAFTAR TABEL....xviii
BAB I PARADIGMA DAN INOVASI ADMINISTRASI PUBLIK: DARI KONSEP MENUJU IMPLEMENTASI....1
A. PENDAHULUAN....1
B. BAGIAN 1 – PEMBAHASAN UMUM: EVOLUSI PEMIKIRAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK....3
1. Old Public Administration: Era Birokrasi Rasional....4
2. New Public Management: Efisiensi dan Orientasi Pasar....4
3. New Public Service: Pelayanan Berbasis Nilai dan Keterlibatan Warga....5
4. Prinsip-Prinsip Good Governance: Penguat Tata Kelola Modern....6
5. Perbandingan Tiga Paradigma: Sebuah Refleksi....6
C. BAGIAN 2 – STUDI KASUS DAN IMPLEMENTASI PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA....7
1. Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pelayanan Publik: Studi Kasus SP4N-LAPOR!....7
2. Integrasi Layanan dalam Mal Pelayanan Publik (MPP): Pendekatan NPM dan NPS....8
3. Digitalisasi Layanan Publik di Masa Pandemi: Contoh E-Kelurahan....9
4. Refleksi Umum dari Studi Kasus....10
D. BAGIAN 3 – KESIMPULAN....10
DAFTAR PUSTAKA....13
BAB II SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI KONSEP UTAMA ADMINISTRASI PUBLIK....14

A. SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI KONSEP UTAMA ADMINISTRASI PUBLIK 14
B. SUMBER DAYA MANUSIA: STRATEGI, TANTANGAN, DAN TUJUAN SEBAGAI ASPEK PENTING DALAM BIDANG ADMINISTRASI PUBLIK 18
C. PENGEMBANGAN MANAJEMEN SDM: KEPEMIMPINAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN TRANSFORMASI DIGITAL 23
D. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DIGITAL 34
E. KUALITAS SDM DAN TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI: STUDI PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA 39
DAFTAR PUSTAKA 47
BAB III REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK 52
A. REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK: TANTANGAN DAN STRATEGI MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK 52
B. REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PUBLIK 56
C. REFORMASI BIROKRASI INDONESIA DALAM MENANGANI KORUPSI DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK 61
D. TRANSFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK: STUDI KASUS TENTANG RESISTENSI, ADAPTASI, DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK 66
E. REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK: STUDI KASUS PENERAPAN E-GOVERNANCE PADA KOTA MALANG DAN MATARAM 71
DAFTAR PUSTAKA 84
BAB IV GOOD GOVERNANCE 89

A. KAJIAN KONSEPTUAL DAN DASAR TEORITIS GOOD GOVERNANCE 89
1. Pengertian Good Governance 89
2. Prinsip-Prinsip Utama Good Governance 90
3. Prinsip Dasar Governance di Indonesia 91
4. Memahami Akuntabilitas sebagai Pilar Utama dalam Good Governance 93
5. Representasi Good Governance dalam Era Reformasi 95
6. Good Governance sebagai Tolak Ukur Kinerja Pemerintah 96
7. Good Governance dan Reformasi Birokrasi 96
8. Pendekatan New Public Management (NPM) 97
9. Revitalisasi Prinsip Rule of Law, Demokrasi, dan Good Governance sebagai Pilar Negara Modern 99
B. GOOD GOVERNANCE DALAM KONTEKS ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN 101
1. Good Governance dalam Konteks Organisasi dan Kepemimpinan 101
2. Kontribusi Kepemimpinan Humanistik terhadap Good Governance pada Organisasi Keolahragaan: Studi Literatur 102
3. Pengaruh Good Governance, Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pemerintah 103
4. Good Governance dalam Organisasi Mahasiswa 104
5. Good University Governance (GUG) dalam Pendidikan Tinggi 105
6. Mewujudkan Good Governance melalui Integrasi Good Attitude dan Excellent Service 107
C. GOOD GOVERNANCE DALAM LAYANAN PUBLIK 108
1. Good Governance dalam Prespektif Pelayanan Publik 108
2. Pengaruh Penerapan Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan 110
3. Peningkatan Khusus Pelayanan Publik melalui Penerapan Prinsip Good Governance 111

4. Menciptakan Good Governance melalui Inovasi Pelayanan Publik: Studi Kasus Kota Surakarta 112
5. Strategi Penerapan Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo 112
6. Evaluasi Pelayanan E-KTP Berbasis Online melalui Prinsip Good Governance di Banyu Asin..... 115
7. Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik Online di Dinas Dukcapil Kota Tangerang 117

D. IMPLEMENTASI DAN STUDI KASUS GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAHAN..... 118
1. Dinamika dan Tantangan Implementasi Good Governance di Indonesia..... 118
2. Implementasi Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pemerintahan Kabupaten Lebak)..... 119
3. Evaluasi Praktik Good and Clean Governance untuk Mewujudkan Tata Kelola Transparan di Kecamatan Sukolilo..... 121
4. Otonomi Daerah dan Tantangan Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik 122
5. Implementasi Good Governance pada Pemerintahan Daerah: Studi Kasus pada Kabupaten Bole Bolongo..... 123

E. GOOD GOVERNANCE DAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 124
1. Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara (Good Financial Governance)..... 124
2. Evaluasi Penerapan Good Governance dalam Praktik Pengelolaan Keuangan Negara..... 125
3. Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai Cerminan dalam Mewujudkan Good Governance 126

4. Evaluasi Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance terhadap Akurasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah....128
F. SDM DAN ORGANISASI PEMERINTAH....129
1. Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai BPKAD Deli Serdang melalui Penerapan Good Governance....129
2. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kantor Camat Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara)....130
3. Pengembangan Kompetensi Aparatur Desa di BBPMD Malang sebagai Pilar Mewujudkan Good Governance di Tingkat Desa....131
G. GOOD GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DAN BIROKRASI....133
1. Peran Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi dalam Mendorong Terwujudnya Good Governance....133
2. Hambatan Reformasi Birokrasi dalam Mendorong Good Governance yang Berbasis Partisipasi Masyarakat....134
3. Tantangan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance dan Analisis Program Lapor Mas Waspres dalam Partisipasi Good Governance....136
4. Program Lapor Mas Waspres....137
H. GOOD GOVERNANCE DAN DIGITALISAS PEMERINTAH (E-GOVERNMENT)....138
1. Kontribusi E-Government dan Reformasi Birokrasi terhadap Peningkatan Good Governance dan Kinerja Lembaga Publik....138
2. Evaluasi Hubungan antara Pencapaian E-Government dan Good Governance di Indonesia....140
I. GOOD GOVERNANCE DI TINGKAT LOKAL & KOMUNITAS....141
1. Perwujudan Good Governance melalui Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi: Kasus Desa Banabungi....141

2. Upaya Mewujudkan Good Governance melalui Collaborative Governance dalam Pengelolaan BUMDesa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro 143
3. Integrasi Budaya dalam Praktik Good Governance: Studi di Kalimantan Timur 146
J. GOOD GOVERNANCE DAN LINGKUNGAN HIDUP 147
K. KAJIAN PERBANDINGAN DAN LITERATUR 149
1. Perbandingan Good Governance di Indonesia dan Singapura dalam Kasus Korupsi 149
2. Systematic Literature Review: Transparansi dan Akuntabilitas dalam Implementasi Good Governance di Indonesia 150
L. GOOD GOVERNANCE DALAM KONTEKS SOSIAL & PEMBANGUNAN 152
DAFTAR PUSTAKA 154
BAB V PELAYANAN PUBLIK 159
A. PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK 159
B. KUALITAS DAN STRATEGI DALAM PELAYANAN PUBLIK 162
1. Kualitas Dalam Pelayanan Publik 162
2. Strategi Dalam Pelayanan Publik 171
C. PENGARUH PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI BIDANG PEMERINTAHAN, TEKNOLOGI, DAN EKONOMI 174
1. Bidang Pemerintahan 175
2. Bidang Teknologi 178
3. Bidang Ekonomi 179
D. PENANGANGAN PADA FAKTOR PERMASALAHAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PELAYANAN PUBLIK 181
1. Hubungan antara Employee Performance Terhadap Recuitment & Selection 182

2. Hubungan antara Employee Performance Terhadap Training & Development 183
3. Hubungan antara Employee Performance Terhadap Compensation 183
DAFTAR PUSTAKA 185
BAB VI PENTINGNYA ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK 190
A. ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK: PRINSIP DAN PENDEKATAN UTAMA DALAM ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK 196
B. ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK: ETIKA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 198
C. ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK: STRATEGI PENGUATAN ETIKA DALAM BIROKRASI 202
D. ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENCAPAI ETIKA KEADILAN SOSIAL ... 209
E. ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK: TANTANGAN DAN KEGAGALAN DALAM PENERAPAN ETIKA 212
F. ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK: MEMBANGUN DINAMIKA ETIKA PARTISIPASI MASYARAKAT 217
G. ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK: PERENARAPAN ETIKA DI ERA DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* 219
DAFTAR PUSTAKA 224
BAB VII INOVASI ADMINISTRASI PUBLIK 229
A. ADMINSTRASI PUBLIK 229
B. INOVASI 230
C. INOVASI SEKTOR PUBLIK 231
D. INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK 232
E. PERAN INOVASI DALAM TRANSFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK 233

F. PENTINGNYA INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK DI ERA DISRUPSI....233
G. INOVASI BERDASARKAN METODE....234
H. FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG KETERBUKAAN PUBLIK....235
I. INOVASI DALAM PRAKTIK KASUS DAERAH DAN DESA....236
J. KONTEKS PENDIDIKAN AGAMA ADAPTASI PESANTREN DI ERA DIGITAL....237
K. INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI DAN KEPENDUDUKAN DI DESA MOJOMALANG....238
L. INOVASI DIGITAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PELAYANAN PUBLIK....240
M. INOVASI PUBLIK....241
N. INOVASI PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN GARUT....245
O. KONTRIBUSI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENINGKATAN KINERJA SEKTOR PUBLIK DAN....248
P. PENERAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERUPA PROGRAM E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ENREKANG....251
Q. KONSEP TATA KELOLA....254
R. STUDI KASUS INOVASI ADMINISTRASI PUBLIK....257
S. INOVASI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK....260
T. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENDUKUNG INOVASI ADMINISTRASI PUBLIK....260
DAFTAR PUSTAKA....263
BAB VIII ELECTRONIC GOVERNMENT: IMPLEMENTASI, TANTANGAN, DAN STRATEGI DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK DI INDONESIA....266
A. EFEKTIVITAS E-GOVERNMENT DI MALL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PANDEGLANG....266

B. BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI PENGUKUR KESIAPAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN E- GOVERNMENT 268
C. IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA: STUDI KASUS BERBAGAI DAERAH.....269
D. ELECTRONIC GOVERNMENT: STRATEGI DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG EFISIEN DAN TRANSPARAN 270
E. EFEKTIVITAS E-GOVERNMENT DI MALL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PANDEGLANG.....271
F. ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN CERDAS DALAM SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK.....273
G. ANALISIS KUALITAS LAYANAN E-GOVERNMENT DENGAN PENDEKATAN E-GOVQUAL MODIFIKASI.....275
H. ARSITEKTUR ENTERPRISE SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN SMART VILLAGE PADA DIMENSI GOVERNANCE (ADMINISTRATION SERVICE) 276
I. PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT)DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: REVIU LITERATUR SISTEMATIS 278
J. IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM PERSURATAN ELEKTRONIK PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA.....279
K. STRUKTURASI DAN PENGUATAN KETAHANAN DESA: TINJAUAN HUKUM ATAS IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN DESA BERBASIS ELEKTRONIK.....280
L. EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN

ADMINISTRASI (SIOLA) DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 281
M. ELECTRONIC GOVERNMENT SYSTEM MODEL MEASUREMENT MODEL: A SYSTEMATIC TESTING OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION 282
N. ANALISIS KOMPETENSI PEGAWAI DALAM OPTIMALISASI PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS..... 283
O. BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI INDIKATOR PENGUKUR KESIAPAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT..... 284
P. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIC GOVERNMENT DI KPP PRATAMA MEULABOH 285
Q. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIC GOVERNMENT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG..... 287
R. EVALUASI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INSTANSI XYZ..... 287
S. PENILAIAN PENERIMAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA 288
T. EVALUASI IMPLEMETASI E-GOVERNMENT MENGGUNAKAN METODE PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT INDONESIA (PEGI)..... 290
U. STUDI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA : MEMBANGUN E- GOVERNMENT YANG BERORIENTASI PADA KUALITAS LAYANAN 291
V. PENILAIAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI PUSTEKOM KEMENDIKBUD BERBASIS METODE PEGI..... 292
W. FAKTOR ADOPSI LAYANAN E-GOVERNMENT JENIS LAYANAN TRANSAKSI..... 293
X. PIRANTI BANTU PENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN ... 294

Y. ELECTRONIC GOVERNMENT 295
DAFTAR PUSTAKA.....299
BAB IX KEBIJAKAN PUBLIK.....303
A. HAKIKAT DAN MODEL KEBIJAKAN PUBLIK.....303
1. Definisi dan Karakteristik Kebijakan Publik.....303
2. Model-Model Analisis Kebijakan Publik 304
3. Tahapan Proses Kebijakan Publik 307
B. KONSEP DASAR DAN SIKLUS KEBIJAKAN: HAKIKAT DAN KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK.....308
C. TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI INDONESIA: PROBLEMATIKA KEBIJAKAN DI INDONESIA 309
D. INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN STUDI KASUS 310
1. Konsep dan Urgensi Inovasi Kebijakan Publik 310
2. Studi Kasus: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....311
DAFTAR PUSTAKA.....313
BAB X DINAMIKA KEPEMIMPINAN:TEORI, IMPLEMENTASI, DAN IMPLIKASI DI BERBAGAI SEKTOR DI ERA MODEREN.....314
A. KEPEMIMPINAN TRANFORMASIONAL SERTA KINERJA UNTUK FLEKSIBIITAS KERJA SEBAGAI MEDIATOR 314
B. PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH SERTA PROFESIONALISME GURU PAI TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA DI KELES 316
C. GAYA KEPEMIMPINAN DAN PEMBANGUNAN DI DESA 318
D. PENGARUH KEPEMIMPNAN TRANSFORMASIONAL SERTA PROMOSI JABATAN TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BUKIT TINGGI 320

E. LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN (LDK) DAN PEMBINAAN KARAKTER UNTUK PENGURUS OSIS SMA NEGRI 8 PADANG 322
F. PERTANGGUNG JAWABAN SEBAGAI SEORANG PEMIMPIN, PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN KITA 324
G. GAYA KEPEMIMPINAN 325
H. PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA ADMINITRASI JAKARTA SELATAN 326
I. KEPEMIMPINAN SEKOLAH DASAR 328
J. IDUL ADHA, CERMIN KEPEMIMPINAN YANG SEJATI 329
K. ETIKA KEPEMIMPINAN DALAM ERA AI TANTANGAN MORAL DALAM MENGADOPSI AI DALAM ORGANISASI 331
L. PERAN PEMIMPIN DALAM ERA AI MENGINTEGRASIKAN TEKNOLOGI AI 331
M. PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENGAKSELERASI PENANGANAN KORUPSI DI ERA DIGITALISASI 5.0 DAN SOSIAL MEDIA 332
N. KARAKTERISTIK DAN METODE KEPEMIMPINAN DALAM REFORMASI DI SEKTOR PUBLIK 334
O. PERAN KEPEMIMPINAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 336
P. PERAN-PERAN UTAMA KEPEMIMPINAN DALAM PELAYANAN PUBLIK 337
Q. KEPEMIMPINAN SEKTOR PUBLIK YANG EFEKTIF: TINJAUAN TOKOH PEMIMPIN DI INDONESIA 338
R. GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI 339
DAFTAR PUSTAKA 341

BAB XI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM ADMINISTRASI PUBLIK 343
A. PENDAHULUAN 343
B. EVOLUSI KONSEP *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM ADMINISTRASI PUBLIK 344
1. Dari *Hierarchical Government* ke *Network Governance* 344
2. Lahirnya *Collaborative Governance* 345
3. Posisi *Collaborative Governance* dalam Spektrum Paradigma Administrasi Publik 346
C. DEFINISI DAN KARAKTERISTIK *COLLABORATIVE GOVERNANCE* 348
1. *Definisi Collaborative Governance* 348
2. Karakteristik *Collaborative Governance* 349
D. *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DAN NILAI PUBLIK 350
E. INTEGRASI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DENGAN HUKUM, POLITIK, DAN MANAJEMEN 352
F. DINAMIKA KEKUASAAN DALAM *COLLABORATIVE GOVERNANCE* 354
G. *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DAN INOVASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK 355
H. IMPLIKASI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* BAGI REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK 357
1. *Collaborative Governance* sebagai Paradigma Baru Administrasi Publik 357
2. Keterkaitan dengan Prinsip *New Public Service* 357
3. Tantangan Implementasi *Collaborative Governance* 358
DAFTAR PUSTAKA 360
TENTANG PENULIS 362

DAFTAR TABEL

Table 1.1. Perbandingan OPA, NPM dan NPS 6